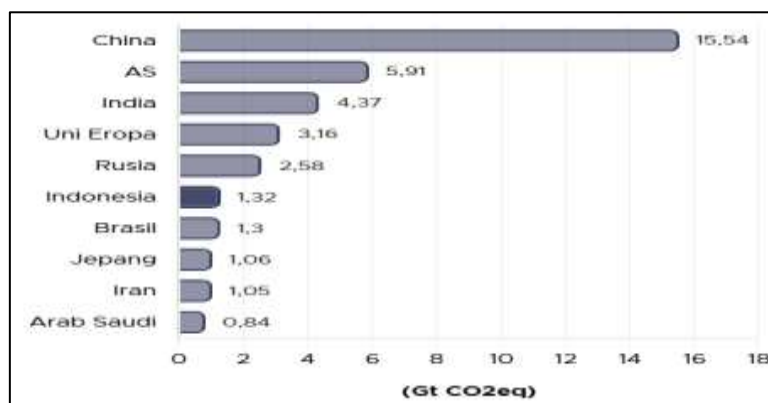


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) tahun 2023 menyebutkan perubahan iklim merupakan ancaman lingkungan yang kompleks dan berlangsung secara berkelanjutan, karena bersifat multifaset mencakup peningkatan cuaca ekstrem, kekeringan, hingga banjir serta multidimensi dengan dampak yang dirasakan dari tingkat lokal hingga global.



Gambar 1. 1 Sepuluh Negara Penghasil Emisi Gas Rumah Kaca Terbesar Tahun 2024

Sumber: Joint Research Centre (JRC) (Ahdiat, 2025)

Gambar 1.1 Mengidentifikasi sepuluh negara yang menghasilkan emisi gas rumah kaca tertinggi pada tahun 2024. Data yang dikumpulkan oleh Joint Research Centre (JRC) menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi keenam di antara negara-negara terbesar di dunia dalam hal emisi gas karbon dioksida (Gt CO₂eq). Negara ini akan menyumbang 2,5% dari total emisi pada tahun 2024, yang setara dengan 1,32 miliar ton karbon dioksida ekuivalen. Angka ini meningkat 5% dari tahun 2023, menempatkannya sebagai salah satu negara yang paling cepat berkembang. Ismail (2020) menyatakan bahwa emisi GRK adalah polutan yang

menyebabkan kerusakan lingkungan melalui kenaikan suhu bumi. Jika gas tersebut terus meningkat di atmosfer secara berkelanjutan, maka akan menyebabkan pemanasan bumi, yang dikenal sebagai global warming. Hal tersebut sejalan dengan (Calvin et al., 2023) dalam laporan IPCC tahun 2023 yang menyatakan GRK akibat kegiatan manusia telah memicu pemanasan global hingga 1,1°C di atas level pra-industri yang dapat memperbesar terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, gelombang panas, dan kekeringan.

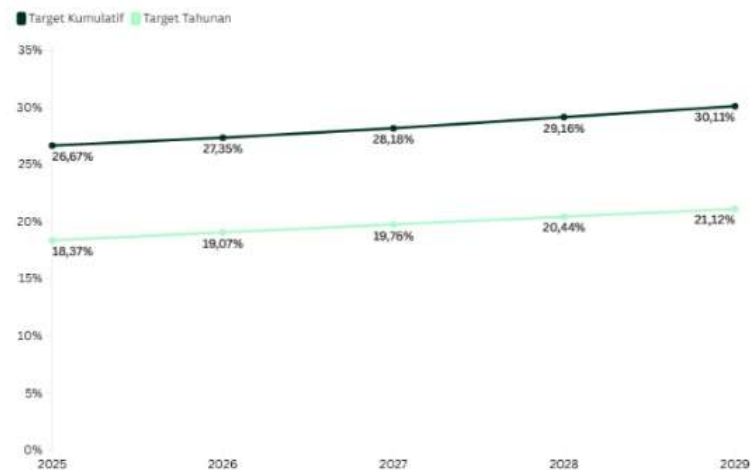
Meningkatnya ancaman perubahan iklim tersebut mendorong masyarakat internasional untuk menyusun berbagai agenda pembangunan berkelanjutan sebagai upaya bersama dalam mengatasi permasalahan lingkungan global. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2015 sebagai ajakan bertindak untuk semua orang. Tujuannya adalah mengurangi kemiskinan, menjaga kelestarian lingkungan, serta mewujudkan kehidupan yang damai dan sejahtera bagi seluruh masyarakat pada tahun 2030. Salah satu tujuan penting dalam SDGs adalah Poin 13, yakni *Climate Action*. Menurut Murniningtyas, 2018 dalam (Idrus & Usi, 2024) Tiga tujuan utama yang termasuk dalam SDGs 13 untuk penanganan perubahan iklim: meningkatkan ketahanan dan kapasitas terhadap bencana bencana dan iklim; Upaya penanggulangan perubahan iklim perlu diintegrasikan ke dalam berbagai kebijakan, strategi, dan perencanaan pembangunan nasional. Selain itu, diperlukan penguatan pendidikan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam mengupayakan pelaksanaan

mitigasi, adaptasi, pengurangan risiko dampak perubahan iklim, serta penyelenggaraan sistem peringatan dini yang efektif.

Sebagai upaya mendukung pencapaian (SDGs) ke-13 mengenai penanganan perubahan iklim, Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan strategis yang berfokus pada penurunan emisi GRK sekaligus memperkuat kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Komitmen tersebut diperkuat melalui ratifikasi Persetujuan Paris dalam kerangka UNFCCC yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*. Melalui ratifikasi tersebut, Indonesia menetapkan target penurunan emisi dalam dokumen NDC sebagai bentuk kontribusi nasional terhadap upaya mitigasi perubahan iklim. Dalam target yang ditetapkan, Indonesia berkomitmen menekan emisi GRK sebesar 31,89% secara mandiri pada tahun 2030, serta meningkatkan capaian tersebut hingga 43,20% apabila memperoleh dukungan dari kerja sama internasional (DJPPi KLHK, 2024).

Komitmen Indonesia dalam menekan emisi GRK juga tercermin dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, salah satunya melalui RPJMN. Dalam dokumen tersebut, isu perubahan iklim ditetapkan sebagai salah satu agenda strategis pembangunan nasional. Pada RPJMN Tahun 2025–2029, pemerintah menargetkan penurunan emisi GRK sebesar 45,17% selama periode lima tahun. Penetapan target tersebut didasarkan pada intensitas emisi terhadap pertumbuhan ekonomi atau besarnya emisi per satuan Produk Domestik Bruto (PDB). Pendekatan ini memiliki tujuan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi nasional tetap berjalan seiring dengan komitmen pengendalian perubahan iklim dan

upaya dalam mencapai target penurunan emisi. Adapun sasaran jangka panjang penurunan emisi karbon dioksida per tahun dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. 2 Target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 2025-2029

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2025)

Gambar 1.2 memperlihatkan target pengurangan emisi GRK Indonesia hingga tahun 2029 berdasarkan laporan Kementerian PPN/Bappenas. Secara kumulatif, target pengurangan emisi ditetapkan sebesar 26,7% pada tahun 2025 dan diproyeksikan meningkat menjadi 27,3% pada tahun 2026, 28,2% pada tahun 2027, 29,2% pada tahun 2028, serta mencapai 30,1% pada tahun 2029. Sementara itu, target penurunan emisi tahunan ditetapkan sebesar 18,4% pada tahun 2025, kemudian meningkat secara bertahap menjadi 19,1% pada tahun 2026, 19,8% pada tahun 2027, 20,4% pada tahun 2028, dan 21,1% pada tahun 2029.

Salah satu upaya mewujudkan target pengurangan emisi GRK yang telah ditentukan dalam RPJMN, pemerintah mengimplementasikan ProKLim sebagai strategi pengendalian perubahan iklim di tingkat masyarakat. Program ini memiliki landasan hukum berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung

Iklim, yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Regulasi tersebut menjadi pedoman dalam penyelenggaraan ProKLim, baik bagi pemerintah, pelaksana program, maupun berbagai pemangku kepentingan yang terlibat. Dalam pelaksanaannya, ProKLim meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif melalui beragam aktivitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, seperti pengelolaan sampah secara berkelanjutan, penghematan energi dan sumber daya air, penghijauan lingkungan, serta penguatan kemampuan masyarakat dalam beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

Dalam pelaksanaannya, ProKLim bertujuan memperkuat kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai risiko perubahan iklim sekaligus berkontribusi terhadap pengurangan emisi GRK melalui berbagai kegiatan yang diterapkan pada skala tapak. Menurut Rofi'i (2021) Selain berperan dalam pengendalian emisi, Program Kampung Iklim (ProKLim) juga mendukung komitmen global untuk menahan laju kenaikan suhu rata-rata bumi agar tetap berada di bawah ambang batas 2°C sebagaimana ditetapkan dalam Persetujuan Paris.

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Timur berdasarkan Kota/Kabupaten 2024

NO	Kota/Kabupaten	Jumlah Penduduk (Ribu)	NO	Kota/Kabupaten	Jumlah Penduduk (Ribu)
1	Kota Surabaya	2.931.611,0	20	Bangkalan	1.112.956,0
2	Malang	2.755.438,0	21	Sampang	1.027.538,0
3	Jember	2.620.135,0	22	Ponorogo	966.111,0
4	Sidoarjo	2.193.692,0	23	Pamekasan	893.327,0
5	Banyuwangi	1.764.540,0	24	Ngawi	887.172,0
6	Kediri	1.702.262,0	25	Kota Malang	879.873,0
7	Pasuruan	1.669.400,0	26	Bondowoso	796.300,0
8	Lamongan	1.386.390,0	27	Madiun	760.948,0
9	Gresik	1.377.287,0	28	Trenggalek	747.614,0
10	Jombang	1.373.793,0	29	Situbondo	704.243,0

11	Bojonegoro	1.330.516,0	30	Magetan	689.209,0
12	Blitar	1.273.451,0	31	Pacitan	589.034,0
13	Tuban	1.231.374,0	32	Kota Kediri	301.202,0
14	Probolinggo	1.193.272,0	33	Kota Probolinggo	252.085,0
15	Mojokerto	1.162.696,0	34	Kota Batu	225.120,0
16	Sumenep	1.159.397,0	35	Kota Pasuruan	222.334,0
17	Lumajang	1.152.264,0	36	Kota Madiun	203.552,0
18	Nganjuk	1.138.604,0	37	Kota Blitar	156.330,0
19	Tulungagung	1.119.588,0	38	Kota Mojokerto	138.613,0
Jawa Timur			42.089.271,0		

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Tabel 1.1 menunjukkan di antara semua kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya memiliki jumlah penduduk terbesar, dengan 2.931.611 jiwa dan luas 335,925 km². Hal tersebut menjadikannya wilayah Kota Surabaya memiliki konsentrasi penduduk terbesar. Ini menunjukkan bahwa, dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur, Surabaya memiliki aktivitas sosial-ekonomi dan kepadatan penduduk yang lebih tinggi (Badan Pusat Statistik, 2025).

Geografis Kota Surabaya rentan terhadap banjir dan genangan saat musim hujan karena sebagian besar dataran rendah dan berada di bagian hilir DAS Brantas. Kondisi diperparah oleh kepadatan penduduk yang tinggi dan dominasi kawasan terbangun, yang mengurangi daya dukung lingkungan. Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Nasional Jawa Timur 2022–2026 menunjukkan bahwa Surabaya adalah daerah dengan tingkat kerentanan penduduk terhadap bencana banjir tertinggi di Jawa Timur. Ini menunjukkan bahwa Surabaya adalah daerah perkotaan dengan populasi yang padat. Jumlah penduduk yang mungkin terpapar bahaya banjir di berbagai daerah ditunjukkan pada grafik berikut, dengan Surabaya menempati posisi tertinggi.



Gambar 1.3 Potensi Penduduk Terpapar Bencana Banjir di Provinsi Jawa Timur

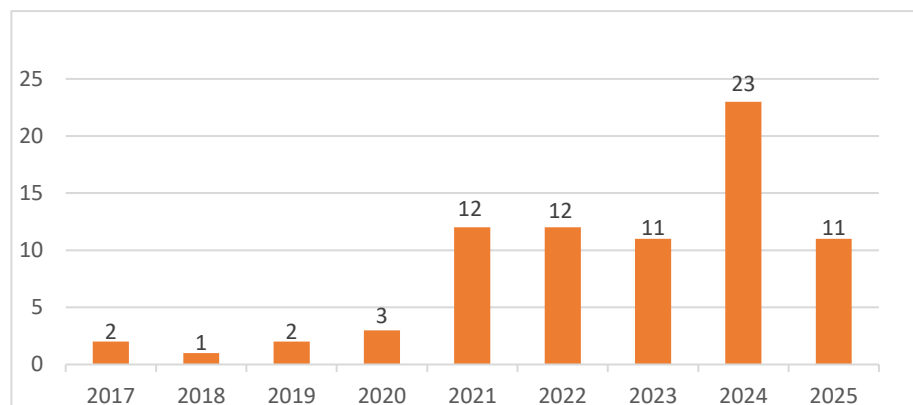
Sumber: Dokumen KRB Nasional Jawa Timur 2022-2026 (BNPB, 2021)

Dengan potensi 2,469.639 jiwa, Kota Surabaya adalah kabupaten/kota dengan potensi terpapar banjir tertinggi di Jawa Timur, sebagaimana terlihat pada **Gambar 1.3** dengan 133.953 jiwa miskin dan 244.061 jiwa dalam kelompok usia rentan. Faktor risiko bencana alam ekstrem sangat tinggi di Surabaya, kota dengan jumlah penduduk terbesar di Jawa Timur.

Berbagai fenomena tersebut mengindikasikan bahwa dampak perubahan iklim di Kota Surabaya tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga memengaruhi kondisi sosial serta Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan kapasitas masyarakat agar lebih siap menghadapi berbagai ancaman yang muncul akibat perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan strategi adaptasi dan mitigasi yang dilaksanakan secara terpadu melalui kolaborasi antar *stakeholders* dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor utama.

Dalam konteks tersebut, pemerintah mengimplementasikan ProKLim sebagai salah satu instrumen kebijakan nasional yang dikembangkan oleh KLHK untuk

memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim sekaligus mendukung upaya penurunan emisi. Bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional, Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 92 Tahun 2024 tentang Program Kampung Iklim, yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 84 Tahun 2016. Regulasi ini menjadi pedoman pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat di tingkat kelurahan dan RW. ProKlim di Kota Surabaya menekankan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan ketahanan iklim lingkungan tempat tinggalnya melalui kolaborasi antar *stakeholders*.



Gambar 1. 4 Jumlah Lokasi ProKlim di Kota Surabaya Tahun 2017 - 2025
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (diolah peneliti, 2025)

Gambar 1.4 menunjukkan jumlah lokasi ProKlim selama 2017-2025 yang bersifat fluktuatif. Pada rentang waktu 2017–2020, jumlah lokasi Program Kampung Iklim (ProKlim) masih relatif terbatas, dengan jumlah tertinggi hanya mencapai 3 lokasi. Memasuki periode 2021–2025, jumlah lokasi Program Kampung Iklim (ProKlim) mulai mengalami peningkatan. Puncak peningkatan terjadi pada tahun 2024 dengan jumlah lokasi mencapai 23 ProKlim.

Peningkatan jumlah lokasi ProKLim tersebut mencerminkan perluasan implementasi program di tingkat masyarakat. Namun demikian, peningkatan kuantitas lokasi tidak serta-merta menunjukkan kualitas capaian program yang optimal, mengingat keberhasilan ProKLim juga ditentukan oleh pemenuhan indikator penilaian tertentu. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman terhadap sistem penilaian Program Kampung Iklim (ProKLim) yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan kategori capaian setiap lokasi.

Sistem penilaian dalam Program Kampung Iklim (ProKLim) didasarkan pada empat indikator utama, yaitu kegiatan adaptasi dengan bobot penilaian sebesar 30%, kegiatan mitigasi sebesar 24%, spektrum sebesar 5%, serta aspek kelembagaan sebesar 40%. Nilai yang diperoleh dari masing-masing indikator tersebut selanjutnya diakumulasikan untuk menentukan kategori capaian ProKLim. Berdasarkan hasil akumulasi nilai, lokasi ProKLim dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu ProKLim Pratama ($\leq 50\%$), ProKLim Madya (51–80%), ProKLim Utama ($> 80\%$), dan ProKLim Lestari, yaitu lokasi yang telah berstatus ProKLim Utama serta memiliki sedikitnya 10 kampung binaan.

Sebaran Program Kampung Iklim Kota Surabaya Tahun 2024

No	Lokasi	Kelurahan	Kecamatan	Tahun	Kategori
1	RW 1	Banjar Sugihan	Tandes	2024	Lestari
2		Pagesangan	Jambangan	2024	Lestari
3	RW 5	Bubutan	Bubutan	2024	Utama
4	RW 11	Karah	Jambangan	2024	Utama
5	RW 5	Medokan Ayu	Rungkut	2024	Utama
6	RW 8	Kedurus	Karang Pilang	2024	Utama
7	RW 6	Sidotopo Wetan	Kenjeran	2024	Utama
8	RW 4	Bangkingan	Lakarsantri	2024	Utama
9	RW 7	Keputih	Sukolilo	2024	Utama
10	RW 8	Semolowaru	Sukolilo	2024	Utama
11	RW 5	Semolowaru	Sukolilo	2024	Utama
12	RW 11	Bendul Merisi	Wonocolo	2024	Utama
13	RW 2	Sumur Welut	Lakarsantri	2024	Utama
14	RW 14	Babat Jerawat	Pakal	2024	Utama
15	RW 7	Babat Jerawat	Pakal	2024	Utama
16	RW 7	Sambikerep	Sambikerep	2024	Utama
17	RW 9	Banyu Urip	Sawahan	2024	Utama
18	RW 3	Simomulyo Baru	Sukomanunggal	2024	Utama
19	RW 1	Manukan Kulon	Tandes	2024	Utama
20	RW 6	Babatan	Wiyung	2024	Utama
21	RW 5	Balas Klumprik	Wiyung	2024	Utama
22	RW 7	Sememi	Benowo	2024	Utama
23	RW 6	Bubutan	Bubutan	2024	Utama

Gambar 1. 5 Sebaran ProKlim Kota Surabaya Tahun 2024
 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (diolah peneliti, 2025)

Gambar 1.5 menunjukkan distribusi lokasi ProKlim tahun 2024 di Surabaya dengan dominasi kategori Utama sebanyak 21 lokasi dan hanya 2 yang berhasil mencapai kategori Lestari, yaitu RW 01 Banjar Sugihan di Kecamatan Tandes dan Kelurahan Pagesangan di Kecamatan Jambangan. Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada implementasi ProKLim kategori Lestari di ProKlim RW 01.

RW 01 Kelurahan Banjar Sugihan dipilih sebagai lokasi penelitian karena wilayah tersebut memiliki kerentanan terhadap banjir dan penumpukan sampah. Kerentanan banjir di RW 01 Kelurahan Banjarsugihan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yaitu tingginya curah hujan, kondisi fisik wilayah yang kurang mendukung, termasuk adanya lahan kosong yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta masuknya aliran air dari wilayah lain elevasi yang lebih tinggi sehingga

meningkatkan potensi terjadinya genangan dan banjir (Puspitasari & Putro, 2024).

Hal ini selaras dengan pendapat Bapak Wawan selaku Koordinator Komunitas Nol Sampah sebagai berikut:

“Kami lebih pada penguatan di pengelolaan sampah karena memang saat itu pihak DLH bilang RW 01 banjar sugihan itu ketika maju di ProKlim utama mereka agak lemah di system pengelolaan sampahnya.” (Hasil wawancara 19 Juni 2026)

Selain itu, pelaksanaan Program Kampung Iklim di wilayah ini berlangsung secara bertahap dan melibatkan peran pihak eksternal. Proses pembinaan, pendampingan, serta adopsi praktik dari wilayah lain menunjukkan adanya interaksi dan koordinasi antaraktor di luar masyarakat setempat, sehingga relevan untuk dikaji dalam konteks tata kelola pelaksanaan program.

Sebelum meraih penghargaan ProkLim Lestari, RW 01 Banjar Sugihan telah aktif terlibat dalam berbagai kegiatan yang berfokus pada tema lingkungan sejak tahun 2017. Inisiatif awal dalam kegiatan lingkungan ini mulai muncul setelah terpilihnya Bapak Lukas Prastowo sebagai Ketua RW 01 Banjar Sugihan pada tahun 2017 yang kemudian menjadi penggerak utama hingga pada tahun 2024. Beberapa pencapaian yang telah diraih meliputi: peringkat 75 besar dalam Merdeka dari Sampah 2018, pemenang kategori lingkungan terbaik di Surabaya *Smart City* 2019, kategori utama Proklim 2021, juara 3 *Best of Best* Lomba Kampung Surabaya Hebat 2023, serta juara 2 dalam Lomba Asuhan Mandiri Toga tingkat Surabaya 2023. Berbagai capaian tersebut menunjukkan adanya konsistensi pengelolaan lingkungan di RW 01 Kelurahan Banjar Sugihan. Namun, capaian ini tidak serta-

merta menggambarkan bahwa seluruh proses pengelolaan program telah didukung oleh pola kolaborasi multipihak yang terstruktur dan berkelanjutan.

Pada tahun 2021 ProKlim Utama RW 01 Banjar Sugihan masih berada dalam pembinaan Kelurahan Jambangan. Berbagai upaya adaptasi dan mitigasi yang dilakukan banyak mengacu pada program yang telah diterapkan di Jambangan, dengan dukungan DLH sebagai fasilitator dalam pelatihan-pelatihan yang diperlukan. Setelah memperoleh penghargaan ProKlim Utama di tahun 2021 kampung RW 01 Banjarsugihan melakukan penilaian terhadap aspek-aspek yang masih kurang agar dapat diperbaiki di waktu mendatang. Dari situlah timbul ambisi awal untuk meraih penghargaan ProKlim Lestari. Hal ini selaras dengan informasi yang disampaikan oleh Bapak Budi selaku Pokdarling:

“Awalnya kita ikut lomba lingkungan waktu itu kalau nggak salah mulai tahun 2017 ya cuma yang intensif itu 2019 waktu awal-awal COVID itu jadi kita ikut pertama kalau 2017 kan ada MDS ada *Green and Clean* itu kita sempat ikut cuman habis itu break 2019. Kita mulai gencar lagi itu dimulai dari SSC (Surabaya *Smart City*). Habis dari SSC terus akhirnya kita ikut ProKlim itu ProKlim Utama. Terus kita nggak puas terhadap hasilnya (penilaian) kan kita bandingkan secara kasatmata kita kok bisa kalah kok bisa kategori 3 kita kalah sama Manukan Kulon. Mosok se adewe kalah, kok iso kalah.” (Hasil wawancara 14 Oktober 2025).



Gambar 1. 6 Trophy ProKlim Lestari Tahun 2024
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (2025)

Perubahan dilakukan secara perlahan melalui langkah-langkah kecil yang menumbuhkan keyakinan akan adanya perbaikan. ProKlim RW 01 Banjar Sugihan berhasil memperoleh penghargaan ProKlim Lestari yang ditunjukkan pada **gambar 1.6**, hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 893 Tahun 2024. Berdasarkan dokumen “Laporan Profil ProkLim Lestari RW 01 Banjar Sugihan” penerapan ProKLim di RW 01 Banjar Sugihan mengacu pada 3 indikator yaitu adaptasi, mitigasi, dan kelembagaan. Indikator adaptasi meliputi beberapa bentuk kegiatan seperti pertanian, peternakan, perikanan, pengolahan limbah (hewan dan manusia), memiliki lubang Penampung Air Hujan (PAH), lubang biopori sejumlah, sumur resapan, rorak/joglangan, saluran pembuangan air sepanjang 5 ha, tanggul banjir, sistem peringatan banjir, jalur evakuasi, dan pengendalian vektor

Indikator mitigasi meliputi kegiatan penggunaan energi terbarukan berupa solar cell, pengolahan sampah (limbah padat, cair, dan B3), pengangkutan sampah ke TPA secara mandiri, pengomposan, kegiatan 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle), IPAL sederhana. Indikator terakhir yaitu kelembagaan, meliputi pembentukan Bank Sampah Mandiri, Kelompok Sadar Wisata, Dinas Lingkungan Hidup, Komunitas Nol Sampah Surabaya, PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) atau PELINDO Petikemas, dan Universitas Surabaya. Aspek kelembagaan tersebut berperan penting dalam mendukung keberlanjutan kegiatan dan aktivitas masyarakat, serta dalam memotivasi warga untuk terus berinovasi dalam pengembangan wilayah dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Dukungan kelembagaan tersebut diwujudkan melalui adanya stimulasi dan sinergi dari berbagai pihak eksternal, antara lain dalam bentuk pembinaan, pendampingan, pelatihan, dan kegiatan edukasi. Pihak pemerintah yang terlibat meliputi Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Hal ini selaras dengan informasi yang disampaikan oleh Bapak Lukas selaku Ketua ProKlim:

“Dukungan dari DLH mulai awal sekali ProKlim sampai dengan mendapatkan hasil, kita mendapatkan pendampingan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya...” (Hasil wawancara 14 Februari 2026).

Salah satu bentuk kegiatan pembinaan juga tercermin dalam publikasi kegiatan melalui akun media sosial Instagram. Hal ini dapat dilihat pada tampilan akun *@proklmrw1banjarsugihan* yang memuat dokumentasi kegiatan sebagai berikut.



Gambar 1. 7 Dokumentasi Pelatihan Budaya Kepiting Oleh DLH

Sumber: Laman instagram *@proklmrw1banjarsugihan*, 2026

Selain itu, dukungan juga datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti komunitas Nol Sampah, sektor dunia usaha PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) atau PELINDO serta pihak akademisi melalui kegiatan mahasiswa seperti program pemberdayaan masyarakat Seperti yang disampaikan oleh Bapak Lukas selaku Ketua ProKlim, sebagai berikut:

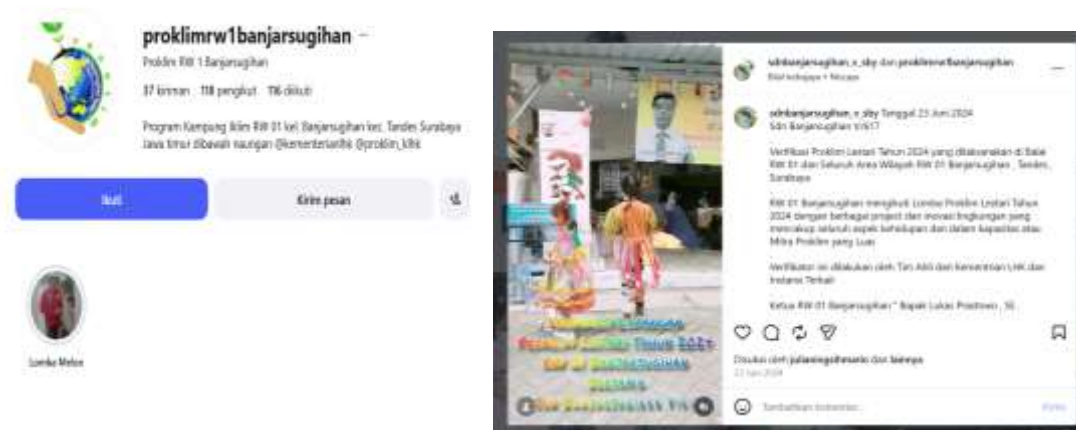
“Dari Nol Sampah ini dari LSM lingkungan ya itu *compos bag*, CSR dari PELINDO itu dia membantu berupa dana yang kami uangkan. Jadi dari Pelindo itu kami rupakan gapura. Untuk Universitas Surabaya mereka memberikan bantuan berupa solar cell dan mengirimkan mahasiswanya untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di sini.” (Hasil wawancara 14 Februari 2026).

Meskipun berbagai aktor telah terlibat dalam mendukung pelaksanaan ProKLim, keterlibatan lintas sektor tersebut masih cenderung bersifat parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam suatu pola kolaborasi yang terstruktur. Kondisi ini mengakibatkan belum optimalnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendorong pengembangan program secara menyeluruh.

Dampak dari belum terintegrasinya kolaborasi tersebut dapat dilihat dari masih terbatasnya dukungan sumber daya, khususnya dalam aspek pendanaan. Keterbatasan anggaran berdampak pada belum optimalnya pengembangan berbagai sektor termasuk pemanfaatan energi terbarukan seperti solar cell dan mikrohidro, serta pengembangan sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan pengelolaan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa peran sektor pemerintah dan dunia usaha dalam mendukung program masih perlu diperkuat.

Selain itu, tantangan juga terlihat pada aspek peran media dalam mendukung pelaksanaan program. Dalam konteks ini, media berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, publikasi kegiatan, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap program yang dijalankan. Namun demikian, pemanfaatan media khususnya media sosial masih belum berjalan secara optimal. Hal ini tercermin dari penggunaan media sosial seperti Instagram yang belum dimanfaatkan secara konsisten dalam menyampaikan informasi kegiatan maupun perkembangan

program kepada masyarakat. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tampilan akun media sosial yang menunjukkan frekuensi unggahan yang masih terbatas dan belum berkelanjutan, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 1. 8 Tampilan Akun Instagram ProKlim RW 01 Banjarsugihan
 Sumber: Akun Instagram @proklmrw1banjarsugihan, 2026

Temuan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan informan. Hal ini selaras dengan informasi yang disampaikan oleh Bapak Lukas selaku Ketua ProKlim:

“Untuk sosial media masih kami kelola bersama-sama. Masih belum ada, sebetulnya saya mencari. Ya istilahnya menambah lapangan pekerjaan dengan juga mempromosikan umkm nya kita dan juga kampung RW 1 Banjar Sugihan.” (Hasil wawancara 14 Februari 2026).

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ProKlim di RW 01 Kelurahan Banjarsugihan telah mencapai kategori Lestari pada tahun 2024, keberlanjutannya masih membutuhkan penguatan, terutama dalam hal kerja sama kelembagaan dan partisipasi pemangku kepentingan. Keberlanjutan program tidak hanya ditentukan oleh kemampuan administrasi tetapi juga oleh kemampuan para aktor untuk bekerja sama, bekerja sama, dan mendukung program dalam jangka panjang.

Secara regulatif Peraturan Walikota Surabaya Nomor 92 Tahun 2024 pasal 14 ayat (2) tentang Program Kampung Iklim di Kota Surabaya menegaskan bahwa “Pelaksana ProKlim dapat mengadakan kerja sama dan kemitraan dengan: a) kelompok ProKlim lain; b) badan usaha; c) perguruan tinggi; d) lembaga penelitian dan pengembangan; e) organisasi masyarakat; f) lembaga swadaya masyarakat; dan/atau g) mitra pembangunan yang melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan ProKlim”. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan ProKlim sangat bergantung pada kolaborasi multipihak yang terstruktur dan berkelanjutan.

Menurut laporan kinerja Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK, pelaksanaan ProKlim secara nasional membutuhkan kerja sama fungsional, integrasi, koordinasi, dan kepemimpinan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan pemberdayaan tidak hanya melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama, tetapi juga didukung oleh keterlibatan berbagai aktor dari sektor lain, termasuk pemerintah pada setiap jenjang pemerintahan, perusahaan swasta, komunitas umum, kelompok masyarakat, dan lembaga media (Ismiartha, Santoso, & Hanani, 2021).

Melihat kesenjangan antara apa yang diamanatkan regulasi dengan apa yang terjadi di lapangan, penting untuk menganalisis bagaimana pola kolaborasi antar aktor dalam ProKlim RW 01 Banjar Sugihan. Aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program ini meliputi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, kelompok masyarakat setempat seperti Pokdarling dan Pokdarwis, komunitas lingkungan Nol Sampah, sektor dunia usaha melalui PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) atau PELINDO, pihak akademisi dari Universitas Surabaya yang terlibat

melalui kegiatan pengabdian masyarakat dan media dalam penyebaran informasi. Untuk itu penelitian ini menggunakan Teori *Pentahelix*, yang menekankan pentingnya interaksi antara Akademisi, Bisnis, Pemerintah, Komunitas, dan Media dalam mendukung keberhasilan suatu program (Sudiana et al., 2020)

Sejalan dengan itu, berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kolaborasi multipihak merupakan faktor keberhasilan Program Kampung Iklim (ProKlim) seperti penelitian oleh Zagarino & Wahyudi, (2025) menemukan bahwa sinergi antara akademisi, komunitas, bisnis, pemerintah, dan media mampu meningkatkan kesadaran lingkungan dan partisipasi masyarakat. Sementara itu, Sumaryatiningsih & Nugraha (2025) menunjukkan bahwa keberlanjutan ProKlim ditopang oleh kepemimpinan kolaboratif serta partisipasi masyarakat yang kuat.

Penelitian lain dari Fakhri at al. (2025) menunjukkan bahwa kerja sama antara kelima pihak tersebut merupakan faktor utama dalam keberhasilan program pemberdayaan yang berkelanjutan. Menurut Dwineo & Yuwono (2025) Kesuksesan Program Kampung Iklim didukung oleh visi bersama, struktur kolaboratif yang jelas, dan penyesuaian dengan kebutuhan lokal. Namun, pembangunan kapasitas institusional dan peningkatan koordinasi diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa kolaborasi pentahelix menjadi salah satu faktor keberlanjutan ProKlim. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya terlihat di RW 01 Kelurahan Banjarsugihan, di mana pola kerja sama antar berbagai pihak belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan Program Kampung Iklim (ProKlim) masih

memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menggunakan teori *pentahelix* yang menekankan pentingnya interaksi antara Akademisi, Bisnis, Pemerintah, Komunitas, dan Media dalam mendukung keberhasilan sekaligus keberlanjutan suatu program (Sudiana et al., 2020). Melalui fenomena yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis *Pentahelix* dalam Mendukung Keberlanjutan Program Kampung Iklim (Proklm) Pasca Perolehan Kategori Lestari di Kelurahan Banjar Sugihan Kota Surabaya**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam studi ini adalah bagaimana analisis *pentahelix* dalam mendukung keberlanjutan Program Kampung Iklim (ProKlim) pasca perolehan kategori lestari di Kelurahan Banjar Sugihan Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami peran komponen *pentahelix* dalam mendukung keberlanjutan Program Kampung Iklim (ProKlim) pasca perolehan kategori lestari di Kelurahan Banjar Sugihan Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi yang berguna baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Studi ini berkontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang kajian kebijakan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan berbasis kolaborasi *pentahelix* (pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan media). Temuan penelitian dapat menguatkan teori mengenai fungsi kerja sama multi-aktor dalam menjaga kelangsungan program penyesuaian dan pengurangan dampak perubahan iklim di skala lokal,

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Studi ini bisa dijadikan bahan untuk mengembangkan kurikulum, penelitian lanjutan, serta program pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan masalah lingkungan dan perubahan iklim. Di samping itu, temuan penelitian mampu menguatkan kedudukan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sebagai pusat studi kebijakan iklim dan keberlanjutan di Jawa Timur.

b) Bagi masyarakat di Kelurahan Banjar Sugihan

Studi ini memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai pentingnya kolaborasi antar pihak dalam menjaga keberlanjutan Proklamasi. Masyarakat memperoleh manfaat berupa peningkatan kapasitas, dukungan teknis, serta peluang untuk memperkuat ketahanan terhadap dampak perubahan iklim melalui keterlibatan aktif dalam program

c) Bagi Peneliti

Studi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Ini juga merupakan bagian dari syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur